

# "Keamanan" dan Tanggungjawab Ilmu Pengetahuan

Sutrisno\*

## Abstrak

*Hampir berlaku pada semua term, "keamanan" juga bisa ditarik dalam pemakaian yang meluas, bisa pula menyempit. Yang menarik adalah mengapa ia ditarik meluas, atau mengapa disempitkan? Adakah kebenaran yang bersifat koheren pada dua jenis konstruksi pengertian/definisi meluas-menyempit itu? Tidak ada entitas sosial lain selain intelektual (disini disepadankan dengan 'akademisi') yang berurusan dan akrab dengan ikhwal kebenaran koheren itu, lantas dimana posisinya dalam pergulatan definisi keamanan yang meluas dan menyempit itu? Tulisan pendek ini mencoba menjabah sejumlah pertanyaan itu.*

**Kata Kunci:** Keamanan, Ilmu Pengetahuan, Kebenaran Koheren, Demokrasi

## Prolog

Daniel S. Lev, pada waktu itu Pengajar di Universitas Washington, menulis essay pendek, "*Menciptakan Negara yang Aman Buat Masyarakat*". Tulisan Daniel ini pesanan sahabatnya Pipit R. Kartawijaya, seorang pegawai negeri Jerman, untuk Kata Pengantar buku yang diterbitkannya di Indonesia melalui Henk Publishing, Surabaya. Essay kurang dari 800 kata itu ditulis di Seattle, sebuah kota kecil yang dijuluki "Kota Jam" lantaran dulunya -- tak ada kota lain yang bisa menandingi -- jam-jam seberat dua ton sebanyak 55 buah berdiri di pusat kota ini. Daniel menulis satu tahun sebelum buku Pipit terbit tahun 2006. "Kota Jam", tempat Daniel menulis seperti sedang mengatakan secara mondial "*Time will*

*tell*". Waktu lah yang membuktikan dengan preskripsinya sendiri. Barangkali terasa janggal bagi pemikir keamanan konvensional, elaborasi Daniel perihal keamanan sebagaimana judul essaynya tak menyinggung kepolisian kecuali hanya menyebut satu diksi saja tentang 'polisi'. Inipun diletaknya pada sebuah jajaran bersama-sama dengan rekan institusi sampingnya. Katanya,

*"...lembaga-lembaga negara -- termasuk pengadilan, kejaksaan, polisi, kementerian, militer, badan-badan istimewa, dan seterusnya -- tunduk pada prinsip dan aturan negara, bukan dulu pada keinginan pemerintah, yang karena itu juga terbatas kekuasaannya".*

Apa pesan yang mau dikatakan Daniel? Ia mengelaborasi keamanan tidak sebagaimana umumnya yang difahami kalangan aktor keamanan. Refleksi pendek Daniel ini mempunyai signifikansi bukan sekedar pada perayaan rontoknya rezim otoritarian 15

\* Sutrisno Suki, Doktor Sosiologi Universitas Indonesia kelahiran Rangkaasbitung; Pengajar S1 dan Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta.

tahun lalu, tetapi menjadi sebuah "undangan pertanggungjawaban" untuk mendekati ulang pendefinisian terminologi yang tidak sepele itu. Tulisan Daniel memang bukan gugatan yang baru sama sekali. Barry Buzan lah yang jauh mendahului. Tepat bersamaan pada tahun Suharto lengser Buzan menulis perihal keamanan yang diperluas.<sup>1</sup> Menurut Buzan, keamanan adalah sebuah "paket" yang terdiri dari lima sektor: militer, politik, ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.

Literatur Buzan nampaknya kurang populer bagi sejumlah kalangan, khususnya rekan-rekan pemikir kepolisian baik di kalangan dalam sendiri maupun pengamat di luar institusi ini. Gagasan Buzan yang meletakkan lima sektor menjadi satu paket dipandang 'mengganggu' dasar-dasar demokrasi itu sendiri. Pada prinsipnya gagasan Buzan merupakan stimuli sangat kuat bagi terjadinya rekonstruksi aktor-aktor keamanan. Melalui rekonstruksi inilah "sepertinya" pintu masuk nanti sistem keamanan yang akan menyerupai Orde Baru. Yaitu, memberi peran yang longgar bagi militer memasuki ruang-ruang non-perang.

Pada sisi interaksional, moral demokrasi mengamanahkan terbukanya ruang diskusi untuk menemukan definisi koheren, sehingga (semoga) bukan definisi yang 'dibenar-benarkan' secara kuat-kuatan melalui dimensi logistik dan libido kuasa. Persoalannya, sistem berfikir dalam diskursus yang berkembang secara sayup-sayup ini tidak secara cukup tegas menambatkan pada jangkar ideologi Pancasila. Barangkali terlalu mewah mengalamatkan sistem keamanan ini pada referensi ideologi bangsa. Tetapi, apa iya terhadap ikhwal yang sangat mendasar -- mengatur rasa aman ini -- tidak bisa ditambatkan pada dasar ideologi Pancasila? Melalui pertanyaan semacam ini, hemat Penulis,

sebagai sebuah bangsa, rasanya terhentak baru saja kehilangan tiga nama penting yang (biasa, bahkan mempunyai legitimasi sosial) menafsir--praksis ideologi Pancasila kepada sistem-sistem elementer. Ketiganya berasal dari Univeraitas Gajah Mada. Mereka adalah: Mubyarto,<sup>2</sup> ekonom yang konsen terhadap sistem ekonomi Pancasila; Damardjati Supadjar, konsentrasi pada sistem budaya Pancasila; Kuntowijoyo konsen pada sistem sosial-politik Pancasila. Betatapun sebuah tafsir atas ideologi Pancasila ini sekedar sebuah tawaran diskusi, namun dari sini ditemukan pola yang bersifat terstandar (*standardized*) dalam kontek aplikasi perumusan sistem berfikir. Dalam kerangka umum sebuah sistem pemikiran ditambatkan pada Pancasila, misalnya: 'sistem ekonomi', 'sistem politik', 'sistem budaya', 'sistem pendidikan', 'sistem hukum', 'sistem sosial'; tetapi mengapa begitu langka (bahkan nyaris tak terdengar) gagasan 'sistem keamanan' ditambatkan kepada Pancasila.

Dengan demikian sebagaimana preskripsi di atas, atas nama demokrasi pula betapapun definisi keamanan dan rumusan sistem keamanan didalamnya yang selama ini terlanjur dihafal di luar kepala, utamanya di lembaga-lembaga pendidikan yang mengendalikan otoritas keamanan mendapat tantangan pembacaan ulang secara berbeda. Perbedaan pembacaan membutuhkan keberanian. Karena 'berbeda' berarti tidak lagi menambatkan argumentasi pada yang mentradisi. Apalagi rumusannya sebuah argumentasi tidak lagi memadai sejauh berhenti pada faham 'kadung' ('terlanjur'), bahwa keamanan yang dipegang sudah kadung menggunakan definisi yang "ini" atau bukan yang "itu".

### Konstruksi Definisi Keamanan

Pada sisi lain istilah keamanan dalam pengertian yang serba melampaui (*beyond*),

1. Barry Buzan, et all. 1998. *Security: A New Framework for Analysis*. Lynne Rienner, London.

2. Selain Mubyarto secara samar-samar ada nama lain yang perlu disebut, yaitu Dawam Rahardjo.

sebagaimana dirumuskan Buzan di atas acapkali sulit dipisahkan dari masuknya kontestasi (kepentingan)<sup>3</sup>. Keamanan secara konstitutif merupakan kategori *public goods*, oleh karena itu pendefinisan atasnya tidak bisa terisolasi dari 'hajat orang banyak'. Meskipun demikian tetap perlu koherensi pada tataran pertanggungjawaban ilmu pengetahuan.

Tentu, hari ini masih ada jarak (dibedakan) 'keamanan' yang diartikan Buzan dengan yang dimaksud kalangan kepolisian yang mempunyai pengertian teknis dan terbatas. Pada sisi lain, bukan realitas yang mudah ditarik secara isolatif-demarkasi bahwa 'yang teknis' itu terlepas begitu saja dari 'yang strategis'. Dalam kerangka ini adalah tepat sensitifitas kepolisian meletakkan dimensi pemolisian dalam masyarakat balakangan ini. Misalnya saja program Polmas. Yang dilakukan adalah pelibatan masyarakat dalam tata kelola keamanan yang sensitif terhadap struktur sosial dengan segala gradasi level-level komunitas. Hanya menyangkut penegakkan hukumlah yang bisa diisolasi dari kekuatan manapun.

Sementara, Daniel dalam tulisan pendeknya melacak rasa aman warga negara dari sisi pertanggungjawaban materi administrasi negara. Bisa jadi jalan pikiran semacam ini akan mengalamatkan diskusi pada *common platform* ideologi Pancasila. Tetapi, bisa juga tidak. Kalau diletakkan sebagai sebuah 'metode', cara Daniel ini sama sekali bukanlah sebuah upaya dekonstruksi atas terminologi keamanan layaknya ala pemikir post modern. Alih-alih tidak sedikit pula literatur yang mempunyai *greget* semacam Daniel ini. Secara simplifikasi hampir semua disiplin yang melekatkan sosiologi sebagai kata yang menyandinginya selalu mengandung *greget* wanti-wani terhadap 'rasa

aman' penghuni organisasi apapun bentuknya. Di bangku-bangku sekolah dikenal beberapa, misalnya, Sosiologi Politik, Sosiologi Ekonomi, Sosiologi Hukum, Sosiologi Agama. Sosiologi yang melekat disiplin yang sudah 'dewasa' itu (ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu hukum, dan ilmu agama) adalah sebuah peringatan bahwa di dalam interaksi dan hubungan antar manusia, baik dalam kerangka aktor, organisasi, maupun institusi, bukanlah sebagaimana yang terbaca pada struktur-struktur resmi. 'Struktur resmi' ini tidak bisa diandalkan untuk memahami relasi/interaksi yang sesungguhnya. Dalam rumusan yang rumit itu struktur bisa jadi melekat dalam kultur (kultur yang menstruktur). Dengan kata lain, apa yang dimaksud 'struktur' adalah subtil, bahkan frigile. Pembacaan atas 'struktur resmi' tentu diperlukan sebagaimana yang digeluti Daniel dan Pipit dalam bukunya itu. Bagi Daniel dan Pipit struktur dalam administrasi negara lah yang didaku sebagai biang keladi rasa tidak aman masyarakat. Segala kiprah otoritas keamanan publik (cq. institusi kepolisian) dalam konteks ini kehilangan signifikansinya secara nyata. Ilustrasi dalam Epilog Emha Ainun Nadjib dalam buku ini lebih ekspresif. Ia menulis,

*"kenapa para petani semakin tak sanggup mempertahankan tanahnya, kenapa semakin sirna kedaulatan mereka atas penyelenggaraan benih padi, atas komoditas damen dan unsur-unsur lain di seputar padi, serta atas pengambilan keputusan terhadap harga gabah ?"*

Adakah ruang bagi otoritas keamanan publik (kepolisian) dalam menjawab pertanyaan semacam itu ? Atau, apakah kepolisian memandang pertanyaan semacam itu sebagai realitas yang tidak mengandung unsur-unsur rasa aman masyarakat ? Sekali lagi, tulisan Daniel ini adalah sebuah "undangan" diskusi dimana penjabarannya ditemukan secara lebih ekspresif dan argumentatif dalam bukunya Pipit Ruhayat Kartawijaya. Prinsipnya, kalau salah mengatur ruang, antara ruang pemerintah

3. Periksa, misalnya, Joel Balkan (2002). Kapitalisme itu ber-evolusi. Kaum kapitalis sangat jago dan lincah berselancar dalam gelombang apapun kebijakan negara, bahkan terhadap kebijakan pro-polis sekalipun. Dalam konteks pertarungan definisi keamanan yang meluas dan menyempit kapitalis mengendap-endap untuk terjun dan memanfaatkan keadaan.

dengan ruang negara, definisi keamanan, baik dalam pengertian "k" besar maupun kecil, akan cenderung dikendalikan secara anti-diskursiv. Alias dikendalikan oligarki: terbatas kelompok entitas sosial tetapi surplus kuasa. Tulis Daniel,

*"kalau kurang diperhatikan perbedaan antara negara dan pemerintah, pimpinan politik bisa saja mengesampingkan prinsip-prinsip yang melindungi hak-hak dasar dan keselamatan rakyat"*

Kejumbuan (*terminology-overlapping*) antar institusi dan fungsi yang terjadi pada alam demokrasi hampir merupakan senjata ampuh bagi kelompok sosial yang 'kuasa berbasis logistik' dalam menguasai alat-alat pendefinisi realitas. Meminjam Peter L. Berger, realitas adalah fakta-fakta yang dikonstruksi. Kelompok-kelompok dengan kekuatan logistik dalam kondisi semacam ini leluasa pula mempersempit ruang diskursus. Sebagaimana ilustrasi Amerika tahun 50-an yang diungkap oleh Wright Mills.

### "Spread of Generalized Belief" dan Posisi Intelektual

Proposisi meluas dan menyempitnya makna keamanan di atas tidak untuk dipegangi hitam-putih tanpa menghitung variabel budaya. Paling tidak menelusuri tata pikir yang membangun proposisi itu bisa dipakai untuk memproyeksikan kemungkinan titik temu dua arus utama: arus pendukung RUU Kamnas dengan para penolaknya. Memang tidak sedikit persoalan yang dikandung pada replikasi gagasan Buzan di atas<sup>4</sup>, tetapi apakah persoalan-persoalan ini menjadi peng-absah nihilnya gagasan sistem keamanan yang dieksplisitkan? Penulis memandang pergeseran struktur interksi -- baik lokal maupun global -- kearah solidaritas

4. Jika replikasi ini diletakan pada Draf RUU Kemananan Nasional yang diinisiasi Departemen Pertahanan maka titik singgung pro-kontra terletak pada: 1) restrukturisasi organisasi instansi keamanan nasional. Utamanya pada penempatan Polri di bawah departemen tertentu; 2) pelibatan TNI pada non-pertahanan negara. Ini dipandang sebagai perluasan peran militer yang bersinggungan dengan tugas Polri; 3) gelar operasi militer tanpa prosedur penerahan Presiden dan DPR.

organik, maka kebutuhan eksplisitas aturan main itu akan semakin kuat. 'Aturan main' yang memformat sistem pada prinsipnya berfungsi meminimalisir tafsir atas realitas. Realitas cenderung bergerak bahkan cepat, dengan demikian tafsir atas realitas justru bisa 'liar' jika tanpa ada aturan main yang memformat sebuah sistem.

Kekosongan aturan main untuk menyebut sebagai sebuah 'sistem keamanan' ini cepat lambat merupakan PR bangsa ke depan. Dalam kacamata kebangsaan, sejumlah instrumen negara belum mempunyai kemampuan duduk secara bersama dengan kepala dingin untuk menengok apa yang telah dirumuskan dan kemudian merumuskan format baru sistem yang lebih responsiv.

Pada akhirnya ukuran kedewasaan berbangsa dan bernegara terletak pada modal sosial<sup>5</sup>, selain kemampuan dan keberanian mengkonfirmasi gagasan. Didalamnya mengandung keterampilan memilah dan memilih mana realitas yang diproduksi dari rasa curiga, mana fakta, dan mana opini. Yang perlu dikhawatirkan -- dan gejala ini bukan tanpa alasan -- bahwa yang tersimpan di kepala anak bangsa justru sisa-sisa hari kemarin, sebuah masa dimana orang-orang sipil dihantui ideologi kewaspadaan setelah Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) yang dipimpin Sudomo itu diminta gulung-tikar oleh Pak Harto. Kopkamtib memang bubar, tetapi ideologi kewaspadaan masih bergentayangan. Ideologi kewaspadaan dalam tafsiran Jun Honna mengacu pada cara-cara yang ditempuh ABRI dalam melakukan *counter* terhadap tuntutan-tuntutan demokratisasi dengan cara melakukan pembentukan ulang (*reshaping*) atas kerangka ideologi mereka sebagai alat agar dapat menempatkan berbagai ketidakpuasan yang ada sebagai sebuah 'ancaman' nasional, sehingga akan

5. Banyak pandangan bahwa kekuatan modal sosial bangsa belakangan tergerus justru oleh rasionalitas ekonomi.

sah apabila dijadikan sasaran sebuah operasi keamanan<sup>6</sup>.

**Bias Selebritas.** Sadar atau tidak ideologi kewaspadaan ini dianut sejumlah otoritas pengendali keamanan<sup>7</sup>, bahkan cenderung terpelihara. Terdapat perbedaan mendasar cara beroperasinya ideologi kewaspadaan pada rezim Orde Baru dengan rezim reformasi. Pada era Orde Baru ideologi kewaspadaan beroperasi dalam garis komando yang tegas. Sementara hari ini ketika komando ini *jaim*<sup>8</sup> karena mengikuti langgam demokrasi, maka yang beredar adalah desas-desus. Meminjam analisis Robertus Robert<sup>9</sup>, dalam pertarungan gagasan, yang disukai oleh orang-orang yang lebih banyak menjadi ukuran kebenaran. Ia menyebutnya *popularisme lebih bernilai ketimbang gagasan*. Robert menulis, selebritas dan pengamat dipandang lebih menguasai persoalan ketimbang intelektual. Sayangnya, Robert tidak melihat birokratisasi pada kehidupan sosial. Kehidupan sosial terbirokrasi sedemikian rupa, acapkali otoritas-otoritas yang tidak relevan justru memasuki ruang-ruang garapan intelektual.

Kembali pada diskusi realitas sistem keamana di atas, peran dan fungsi sejumlah pengendali keamanan di lapangan acapkali *overlapping*, sehingga tak jarang menumpahkan konflik berdarah. Persoalan ini tidak pernah selesai secara fundamental melalui cara-cara berkeadaban dengan duduk bersama. Tidak pula mencoba melibatkan intelektual/akademisi untuk mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi. Konsekwensinya di kalangan sejumlah pengendali keamana sulit sekali menghindari -- meminjam Neil Smelser -- *spread of generalized belief*. Dalam skala tertentu Smelser masih relevan untuk memotret hubungan-hubungan antara pengemban fungsi-fungsi keamanan

pasca reformasi. Karena peluang *spread of generalized belief* ini terbuka maka sejumlah fungsi pengendali keamanan mengembangkan narasinya sendiri-sendiri tentang 'pihak sana' yang dikolektifkan. Dalam kerangka semacam ini jika diformulasikan dalam pertanyaan vulgar: mengapa tidak ada upaya konfirmasi antara kelompok-kelompok kepentingan yang terlibat? Apa yang salah dengan mekanisme dan sistem kekuasaan bangsa, selain pada ideologi kewaspadaan yang diwarisinya itu? Adakah tempat bagi fungsi yang memproduksi kebenaran koheren?

Tiga pertanyaan semacam ini merupakan sebuah bentuk protes tentang sempitnya ruang diskursus yang terbuka untuk menemukan kebenaran koheren yang biasa diperankan cendekiawan dan akademisi. Padahal peran intelektual/akademisi pada posisi Smelser menjadi 'wasit' dengan menemukan perumusan yang koheren perihal tata kelola keamanan dalam pergulatan definisi yang sedang bergerak itu. Barangkali kondisi ini paralel dengan struktur kekuasaan Amerika pada dekade 40-an. Sebagaimana penuturan Wright Mills tentang struktur kekuasaan di Amerika kala itu, sebagaimana dituangkan Doyle Paul Johnson (1986; 173)

*"...pertumbuhan rasionalitas formal dalam struktur sosial, seperti yang terungkap dalam organisasi birokratis yang besar dan kompleks menghasilkan penyempitan kebebasan manusia dan hilangnya pemahaman mereka yang substantif mengenai struktur organisasi keseluruhan dimana mereka terlibat"*

Intelektual/akademisi merupakan posisi strategis secara sosiologis dalam sengkabut pembenahan tata kelola keamanan justru amat sangat diperlukan ketika didalamnya terlibat kekuatan sosial yang bermain dalam pergulatan definisi atas realitas. Pada skala tertentu barangkali

6. Jun Honna 2006:3

7. Periksa, misalnya Honna.

8. Jaim nampaknya tepat untuk menjuluki aktor yang tak terbuka atau serba terselubung dalam mengartikulasikan pendapat dan gagasan. Istilah ini berasal dari kependekan 'jaga imej'.

9. Harian Kompas, 25 April 2016.

ini terjadi, namun demikian posisi sosial mereka tidak selalu berdiri pada sebuah titik dimana mampu menarik jarak dari kekuatan-kekuatan sosial. Lagi-lagi mengikuti jalan pikiran Mills, intelektual/akademisi terjebak pada perangkat stagnasi--struktur sosial yang dikendalikan kekuatan sosial tertentu. Tentu, logistik menjadi pokok disini.<sup>10</sup> Akademisi men(di)jadi(kan) tukang para mengendalikan tata kelola keamanan. Kondisi semacam ini buka barang baru. Bahkan Bung Hatta memperingatkan hampir limapuluh sebulan tahun yang lalu dalam pidato pada hari Alumni Pertama Universitas Indonesia, Juni tahun 1957. Katanya,

*"Dalam segala hal ini kaum intelgensia tidak dapat bersikap pasip, menyerahkan segala-galanya kepada mereka yang kebetulan menduduki jabatan yang memimpin dalam negara dan masyarakat".<sup>11</sup>*

Di satu sisi ujaran Bung Hatta ini pukulan keras terhadap apa yang disebutnya sebagai kaum intelgensia, kelas sosial yang memikul pertanggungjawaban kebenaran koherensi. Namun struktur sosial hari ini tidak kongruen dengan limapuluh tahun lalu. Kebebasan yang diformat (politik) demokrasi bisa saja sama tetapi tidak pada unsur-unsur pembentuknya. Kaum intelgensia hari ini tidaklah pasip sebagaimana kritik Bung Hatta. Bukan pula persoalan sempitnya ruang kebebasan. Tetapi ada struktur 'blokade' atas kiprahnya yang otentik pada kehidupan bersama. Orang atau intelgensia bisa bicara apa saja, tetapi sekedar disimpan dalam blog pribadi.

Tentu saja tak perlu memparalelkan pemikiran kritis seorang intelektual terhadap rezim (atau organisasi) sebagai pemikiran yang mengandung kebenaran koheren, sama halnya dengan pemikiran yang menyanjung. Tidak ada hubungan antara

kritisisme dengan kebenaran koheren. Pada tarap tertentu kritisisme menjadi sebuah 'selebritas'. Kritisisme dengan demikian menjadi komoditas politik. Padahal, kebenaran koheren mempunyai kriterianya sendiri dalam format baku. Karena itu pula kebenaran koherensi tidak relevan pada identifikasi sosiologis: bukan pada persoalan pengambilan 'jarak' kekuasaan atau iming-iming logistik. Dalam kerangka semacam ini barangkali pertanyaan Sanderson (2000) menjadi sulit dijawab lantaran kehilangan relevansi. Pertanyaan itu adalah, *'sejauh mana ilmu pengetahuan itu merupakan suatu kegiatan normatif?'*

Kalau pertanyaan itu bisa dinegasikan kalangan intelektual, lantas kepada siapa pula definisi keamanan dengan segala derivasinya itu dialamatkan pertanggungjawabanya? Jarum jam di Seattle dimana Daniel melakukan refleksi keamanan terus bergerak, menggerakkan sistem sosial dalam konstelasi mondial. Gerakannya tidak mau menunggu kondisi lokal yang masih simpang siur merekonstruksi definisi keamanan yang diformat dalam sistem keamanannya. "Menunggu" dalam istilah Francois Chaubet bukan lagi soal strategi tetapi soal hilangnya kesempatan. Ujar Chaubet (2015;23),

*"...sedikit demi sedikit, negara-negara yang besar mengatur produksi pengetahuan dengan lebih sistematis dan bermaksud membangun struktur kelembagaan cendekiawan yang berkelanjutan...globalisasi ilmu pengetahuan pun mencapai suatu sistematisasi tertentu".*

## Epilog

Pengetahuan (dalam kerangka ini dibaca: pengetahuan yang benar yang bertumpu pada sifat koheren) menjadi isu yang menggantikan alat produksi apapun pada era homogenisasi budaya. Merujuk model penuturan Fritjof Capra,<sup>12</sup>

10. Karya impresif Mills yang menjadi rujukan banyak kalangan tentang posisi kelompok akademisi dan cendekiawan ini dalam struktur sosial adalah dalam *The Power Elite*, terbit Tahun 1956.

11. Muhammad Hatta, Tanggungjawab Moral Kaum Intelgensia, dalam Aswab Mahasin dan Ismed Natsir (Peny.):1984 ;15.

12. Fritjof Capra.2009. *The Hidden Connections: Strategi Sistemik Melawan Kapitalisme Baru*, Terjemahan Anyda Praminda, Penerbit Jalasutra, Yogyakarta.

filosof yang akrab menggeluti spritualitas modern, kondisi semacam ini sebagai persenyawaan pengetahuan dengan moralitas. Kebenaran jenis ini diproduksi sedemikian rupa melalui instrumen ketat tanpa intervensi dan referensi kuasa dan iming-iming logistik. Tentu, 'tangan besi' kompetisi ala kapitalisme tidak bisa disetop, intelektual/akademisi terlibat dalam kompetisi ini, sebagaimana dilukiskan Wuthnow tentang Eropa abad-16 dan 17. Konon dalam gambaran Auguste Comte, kebenaran jenis ini membutuhkan prasarat sistem sosial tertentu pula. "Hukum Tiga Tahap"-nya Comte (teologi – metafisik – positivism) bertumpu pada pergeseran ranah sosiologis yang malatari tumbuhnya sistem berfikir. Bukan sebaliknya bahwa tumbuhnya sistem berfikir menjadi tumpuan pergeseran ranah sosial. Proposisi semacam ini terkesan materialis, Marx dan Durkehim menggunakan cara penjelasan semacam ini. Disinilah pesanya, ilmu pengetahuan dan pertanggungjawaban di dalamnya bersifat kolektif. Yang mau dikatakan, pemikiran, tumbuhnya ilmu pengetahuan tertentu, dan aneka jenis gagasan filsafat tidak otonom dari basis sosialnya.

Literatur yang membantu secara impresif menggambarkan hubungan (tumbuhnya) ilmu pengetahuan dengan konteks sosiologis adalah Robert Wuthnow dalam tulisannya *The World-Economy and The Institutionalization of Science in Seventeenth-Century Europe*<sup>13</sup>. Menurutnya desentralisasi mempunyai hubungan kuat dengan pertumbuhan ilmu pengetahuan. Wuthnow menaruh perhatian pada kemajuan Eropa abad ke-16 dan abad ke-17. Pada abad itu Eropa terintegrasi kuat secara komersial oleh kapitalis, tetapi secara politik mengalami desentralisasi. Tentu, istilah 'desentralisasi' tak dimaksud persis sebangun seperti administrasi pemerintahan di Indonesia meskipun pada pengertian yang terbatas secara prinsip tidak pula beda. Yang harus

dibaca dengan desentralisasi ini adalah ruang kebebasan kepada intelektual untuk melakukan pekerjaan mereka. Sekaligus, dalam kompetisi khas kapitalisme itu, intelektual ikut memainkan peran penting. Disinilah persoalannya, melalui perbandingan dengan Eropa abad ke-16 dan 17, kehidupan hari ini (khusus Indonesia) kuasa kapital merambah semua sektor, termasuk kuasa politik. Kuasa ekonomi dan politik bersifat resiprokal, persenyawaan yang tak terpisah. Maka "desentralisasi" sebagaimana dimaksud Wuthnow di atas tidak serta merta memberi kontribusi bagi pertumbuhan ilmu pengetahuan, karena pada dasarnya desentralisasi itu secara substantif sebetulnya nihil. Kalau proposisi ini benar, maka tidak terlalu relevan menagih pertanggungjawaban kepada ilmu pengetahuan, terhadap ikhwal konstruksi "keamanan" dengan segala derivasi dan deviasi pemaknaan di dalamnya. Mudah-mudahan proposisi ini salah....

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bakan, Joel. 2002. *The Corporation*, terj. Sri Isnani Husnayati, PT. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Bergesen, Albert (Edt.). 1980. *Studies of The Modern World System*, Academic Press, New York.
- Buzan, Barry, et all. 1998. *Security: A New Framework for Analysis*, Lynne Rienner, London.
- Capra, Fritjop. 2009. *The Hidden Connections: Strategi Sistemik Melawan Kapitalisme Baru*, Terjemahan Anyda Praminda, Penerbit Jelasutra, Yogyakarta.
- Chaubet, Francois. 2015. *Globalisasi Budaya*, terjemahan Feybe I. Mokoginta, Jelasutra, Yogyakarta.
- Hatta, Muhammad. *Tanggungjawab Moral*

13. Albert Bergesen (Edt.). 1980. *Studies of The Modern World System*, Academic Press, New York.

*Kaum Intelgensia*, dalam Aswab Mahasin dan Ismed Natsir (Peny.).1984

Honna, Jun.2006. *Serdadu Memburu Hantu*, terjemahan Dwi Pratomo Yulianto, Center for Information Analysis, Yogyakarta.

Ismail, Chaeruddin.2015.*Ilmu Kepolisian dan Peerkembangannya di Indonesia*, PT. Merlyn Lestari, Jakarta.

Kartawijaya, Pipit R.2006.*Pemerintah Bukanlah Negara*, Henk Publishing, Surabaya.

Mills, C. Wright.1956. *The Power Elite*, Oxford University Press, New York.

Sanderson, Stephen.2000. *Makro Sosiologi*, terjemahan Farid Wajidi dan S. Menno, PT. Raja Grafinso Persada, Jakarta.

Salmi, Jamil.2003.*Kekerasan dan Kapitalisme*, terjemahan Agung Prihantoro, Pustaka Pelajar, Jakarta.

Suprpto. Tanpa Tahun. *Kumpulan Materi Bahan Kuliah dan Diskusi*, Tidak Dipublikasi.

